KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

1							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 7 4 1			H.4 X	H.4 X Final	
DIREKTORA	T JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A IDENTITAS DE	NEDIMA DENGUASII	AN VANC DIROTONG					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 97 103 205 7 801 000							
A.2 NIK : A.2 NI							
A.3 Nama : INDRA SUKMANA PUTRA							
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	12.326.00	12.326.000	0	5	616.300	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 312							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
	nsi Pemerintah :		ERAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	ITIMUR	
C.3 ID Subunit (Organisasi :					<u> </u>	
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penar	ndatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan ya elektronik sehingga tidak dip	ng berlaku, Direktorat Jenderal Paja erlukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

70WEPV3S